

BAB V

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji konstruksi wacana perlawanan dalam gerakan tagar **#TolakRUUTNI** di platform X (Twitter) pada periode Maret–Mei 2025, dengan menggunakan *Critical Discourse Analysis (CDA)* kerangka Norman Fairclough (1992) sebagai pisau analisis utama. Melalui wawancara mendalam terhadap informan aktivis yang secara aktif berpartisipasi dalam gerakan digital ini penelitian memperoleh data primer yang kemudian dianalisis pada tiga level wacana: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial.

Bingkai synopsis yang ditemukan menunjukkan bahwa penolakan terhadap Revisi UU TNI tidak sekadar bereaksi terhadap konten legislatif, melainkan diintegrasikan ke dalam narasi yang jauh lebih besar: krisis demokrasi Indonesia pasca-Reformasi dan ancaman kemunduran demokratis (*democratic backsliding*) dalam perspektif otoritarianisme kompetitif (Bermeo, 2016; Levitsky & Way, 2018).

Kedua, pada level praktik diskursif alih-alih bergantung pada identitas kolektif yang terorganisir secara formal, mereka mengandalkan *personalized action* (Bennett & Segerberg, 2013): setiap anggota fandom membawa narasi pribadi dan afeksi terhadap idola sebagai bahan bakar mobilisasi politik. Praktik ini menghasilkan volume amplifikasi tagar yang luar biasa tercatat hingga ~395.000 tweet dalam 48 jam pada puncak gelombang protes menurut data Drone Emprit yang melampaui kapasitas gerakan mahasiswa konvensional dalam hal jangkauan dan kecepatan penyebaran.

Ketiga, pada level praktik sosial, gerakan **#TolakRUUTNI** beroperasi dalam konteks kemunduran demokratis yang sistemik: melemahnya oposisi parlementer, menyempitnya ruang kebebasan sipil, dan menguatnya kontrol negara terhadap masyarakat sipil. Dalam kondisi ini, platform digital tidak semata berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai *ruang publik alternatif* (Habermas, 1962; Castells, 2012) tempat warga mempertahankan diskursus kritis yang tidak dapat disuarakan melalui saluran institusional yang telah terkolonisasi kekuasaan.

Temuan komparatif dengan gerakan **#PeringatanDarurat** (Agustus 2024) memperkuat argumen bahwa kedua gerakan ini saling berkelindan dalam membentuk repertoar wacana resistensi digital Indonesia kontemporer. Pola ko-okurensi tagar yang tinggi antara kedua gerakan sebagaimana diidentifikasi melalui analisis jaringan (Muharrom & Gunawibawa, 2026) mengindikasikan adanya kesinambungan ideologis dan berbagi infrastruktur jaringan di antara para aktornya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan ruang lingkup. Data primer bersumber dari wawancara dengan informan yang terbatas sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh spektrum aktor dalam gerakan **#TolakRUUTNI**. Selain itu, akses terhadap dataset tweet mentah mengalami keterbatasan akibat perubahan kebijakan API Twitter/X sejak 2023, sehingga analisis kuantitatif distribusi tagar bersandar pada sumber sekunder (Drone Emprit; Athallah et al., 2025; Sukidin et al., 2025). Keterbatasan ini perlu menjadi catatan metodologis yang transparan dalam pembacaan temuan penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian tersebut, berikut diajukan sejumlah rekomendasi yang terbagi dalam tiga tingkatan: akademis, praktis gerakan sipil, dan kebijakan.

5.2.1 Saran Akademis

Pertama, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas basis data primer dengan melibatkan informan dari beragam latar actor seperti mahasiswa, fandom, aktivis buruh, jurnalis, hingga akademisi agar konstruksi wacana **#TolakRUUTNI** dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan representatif. Triangulasi antara data wawancara dan korpus tweet yang lebih besar akan memperkuat validitas temuan.

Ppeneliti selanjutnya didorong untuk mengeksplorasi kemungkinan akses data melalui jalur akademis resmi seperti kemitraan dengan Drone Emprit, ISEAS-Yusof Ishak Institute, atau Pusat Data Kominfo guna mengatasi keterbatasan akses API yang membatasi analisis kuantitatif skala besar.

5.2.2 Saran Praktis untuk Gerakan Sipil

Pertama, gerakan sipil yang berfokus pada isu demokrasi dan legislasi perlu secara strategis mengakui dan mengintegrasikan komunitas fandom sebagai mitra mobilisasi yang sah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital fandom memiliki kemampuan trending massal, koordinasi cepat, dan jangkauan

demografis yang luas merupakan sumber daya yang sangat berharga namun kerap diabaikan oleh gerakan mahasiswa konvensional.

Kedua, pemimpin gerakan sipil disarankan untuk mengembangkan narasi jembatan (*bridging narratives*) yang menghubungkan isu-isu kebijakan teknis seperti pasal-pasal RUU TNI dengan dimensi kehidupan sehari-hari yang relevan bagi kelompok non-partisan, termasuk generasi muda pengguna media sosial. Framing yang terlalu legalistik atau teknokratis terbukti gagal menjangkau audiens yang lebih luas.

Ketiga, penting bagi gerakan sipil untuk membangun arsip digital yang terdokumentasi dengan baik dari setiap siklus protes, termasuk materi visual, narasi tweet, dan rekaman aksi, sebagai modal memori kolektif yang dapat diaktifkan kembali pada gelombang mobilisasi berikutnya.

5.2.3. Saran bagi Pembuat Kebijakan

Pertama, temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Kecepatan pengesahan RUU TNI yang minim konsultasi publik adalah salah satu pemicu utama gelombang protes digital ini. Dewan Perwakilan Rakyat RI disarankan untuk melembagakan konsultasi publik terbuka dan berbasis bukti sebelum pengesahan setiap undang-undang yang berdampak pada hak-hak sipil. Kedua, pemerintah perlu merespons ekspresi politik digital tidak sebagai ancaman keamanan, melainkan sebagai indikator vital dari kondisi kesehatan demokrasi. Kriminalisasi atau stigmatisasi terhadap aktivisme digital justru

akan memperdalam *surveillance anxiety* yang sudah teridentifikasi dalam wacana gerakan ini, dan pada akhirnya mempercepat erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.

Pada akhirnya, penelitian ini hadir sebagai kontribusi kecil namun bermakna dalam memahami dinamika aktivisme digital Indonesia kontemporer, wacana resistensi, dan krisis demokratis.